



Analisis Implementasi Alokasi Belanja Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya: Studi Kasus Tahun 2023-2024

Almardlina Jantika Esyi^{1*}, Tiara Silviana Putri², Shelsa Aurora Ferdina Hermawan³, Zahwa Amelya Tourmaline⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: almardlina.23047@mhs.unesa.ac.id¹, tiara.23037@mhs.unesa.ac.id², shelsa.23349@mhs.unesa.ac.id³, zahwa.23273@mhs.unesa.ac.id⁴

*Korespondensi penulis: almardlina.23047@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Education is the main pillar in improving the Human Development Index (HDI). With a significant contribution to the development of the quality of human resources, especially in Surabaya City, this study aims to analyze the implementation of education budget allocations in Surabaya City in encouraging equitable distribution of education quality, as well as identifying bureaucratic and technical obstacles that cause inequality between the central city and peripheral areas. This research uses the literature study method by utilizing secondary data from various official sources such as BPS, Bappeda, Education Office, BPK, Ministry of Education and Research, and local policies.

Keywords: Bureaucratic Barriers, Education Budget Allocation, Human Resources, Inequality, Surabaya HDI.

Abstrak. Pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kota Surabaya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi alokasi anggaran pendidikan di Kota Surabaya dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan birokratis dan teknis yang menyebabkan ketimpangan antara wilayah pusat kota dan pinggiran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti BPS, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPK, Kemendikbud Ristek, dan kebijakan daerah.

Kata Kunci: Alokasi Anggaran Pendidikan, IPM Surabaya, Hambatan Birokratis, Ketimpangan, Sumber Daya Manusia.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Menurut UNDP (2020), kerangka pembangunan manusia memandang pendidikan bukan sekadar investasi ekonomi, tetapi sebagai hak dasar dan sarana untuk memperluas kebebasan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa komponen pendidikan memberikan kontribusi sebesar 52,3% terhadap pembentukan IPM Indonesia, lebih tinggi dibanding distribusi sektor kesehatan (27,5%) dan standar hidup (20,2%). Hal tersebut sejalan dengan teori Kapabilitas oleh Amartya Sen (1999) yang memberikan perspektif mendalam tentang mekanisme pendidikan dalam meningkatkan IPM. Menurut Sen, pendidikan dapat memperluas kapabilitas

atau kemampuan untuk mencapai berbagai fungsi kehidupan yang bernilai dan fungsi-fungsi pencapaian nyata yang dihargai.

Di Kota Surabaya, pendidikan memegang peran strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menunjukkan bahwa pada tahun 2023, komponen pendidikan memberikan kontribusi sebesar 54,2% terhadap peningkatan IPM Surabaya, yang mencapai angka 82,08 (BPS Kota Surabaya, 2023). Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) tercatat sebesar 12,3 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 11,91 tahun, namun masih sedikit di bawah target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya tahun 2021-2026, yakni sebesar 12,5 tahun (Bappeda Kota Surabaya, 2023). Temuan ini sejalan dengan teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Martha Nussbaum (2011), yang menekankan bahwa pendidikan merupakan sarana esensial untuk mengembangkan kapasitas individu dan memperluas kebebasan dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif.

Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan untuk sektor pendidikan. Data resmi Bappeda kota Surabaya (2023) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan mencapai 1,23 triliun atau 20,5% dari total APBD. Namun dalam implementasinya, masih menghadapi beberapa tantangan serius, sebagaimana disebutkan dalam teori implementasi kebijakan oleh Pressman dan Wildavsky (1984) tentang kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa timur (2023) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan bahwa penyerapan anggaran pendidikan hanya mencapai 78,6% akibat kendala birokrasi dan perencanaan. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) yang menyatakan bahwa kompleksitas birokrasi menjadi penghalang utama terhadap efektivitas program. Data oleh Dinas Pendidikan Surabaya (2023) menunjukkan bahwa 45% program rehab sekolah terlambat 3-6 bulan akibat prosedur pengadaan yang berbelit. Menurut data Dinas PUPR Surabaya (2023), 70% dana terserap di wilayah pusat kota sementara daerah pinggiran hanya mendapat sebesar 15% yang disebabkan oleh kecenderungan aparat untuk memilih proyek dengan beban administratif lebih ringan. Kecenderungan tersebut sebagai bentuk dari rasionalisasi beban kerja, karena proyek di pusat kota dinilai lebih mudah dikelola karena infrastruktur pendukung yang memadai, aksesibilitas tinggi, dan kelengkapan dokumen yang baik, sementara proyek di daerah pinggiran seringkali terkendala oleh kompleksitas administratif seperti persyaratan izin yang berbelit dan

keterbatasan SDM pendukung, sehingga menciptakan bias alokasi dana, meskipun kebutuhan pendidikan di daerah pinggiran justru lebih mendesak.

Ketimpangan kualitas pendidikan antara pusat kota dengan pinggiran merupakan suatu hal yang serius dan harus segera ditangani oleh pemerintah. Meskipun alokasi anggaran pendidikan Kota Surabaya mencapai Rp 1,23 triliun (20,5% APBD) pada 2023 (Bappeda Surabaya, 2023), ketimpangan kualitas pendidikan antara pusat dan pinggiran telah menjadi masalah struktural yang mengkhawatirkan. Dari segi sumber daya manusia, data Dinas Pendidikan Surabaya (2023) menunjukkan hanya 45% guru di wilayah pinggiran yang bersertifikasi, jauh di bawah angka 82% di pusat kota. Kemudian dalam hal sarana prasarana, Kemendikbud Ristek (2023) mencatat bahwa rasio komputer di sekolah pinggiran mencapai 1:25 siswa, lima kali lebih sedikit dibandingkan pusat kota, yaitu 1:5. Dampak dari ketimpangan ini tercermin dari prestasi akademik, dimana nilai UN Matematika SMP di pinggiran 20% lebih rendah daripada pusat kota (BPS Jatim, 2023). Fenomena ini sejalan dengan teori reproduksi sosial oleh Bourdieu (1977) yang menjelaskan bagaimana sistem pendidikan justru menerapkan ketidakadilan melalui mekanisme alokasi sumber daya yang timpang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi alokasi anggaran pendidikan di Surabaya, khususnya terkait ketimpangan penyerapan anggaran antara pusat dan wilayah pinggiran. Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pentingnya pendidikan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peran strategis APBD Surabaya dalam pembangunan pendidikan, dan mengidentifikasi hambatan birokrasi dan teknis yang menyebabkan ketersediaan fasilitas pembelajaran dan kualitas guru tidak merata dan tidak optimal. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan penggunaan APBD pendidikan sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Surabaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan anggaran pendidikan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis implementasi alokasi dana belanja pendidikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dan berbagai sumber tertulis yang relevan secara sistematis. Sumber sumber yang akan digunakan meliputi jurnal ilmiah,

laporan penelitian, buku, publikasi pemerintah dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Belanja Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya. Dengan demikian pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan mengingat fokus penelitian ini adalah pada tinjauan terhadap kebijakan yang sudah ada dan implementasinya sebagaimana tertera pada literatur.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan dianalisis meliputi dokumen-dokumen kebijakan terkait dengan Alokasi Dana Belanja Pendidikan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran pada kebijakan alokasi anggaran pendidikan di kota Surabaya. Keuntungan yang bisa didapatkan apabila menggunakan data sekunder adalah karena ketersediaanya yang relatif mudah dan kemampuannya untuk memberikan perspektif nyata serta memberikan cakupan informasi yang luas tanpa memerlukan interaksi langsung di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya pendidikan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia

Pendidikan merupakan aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan Pemerintah Indonesia secara tegas menempatkan pendidikan sebagai komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peran sentral pendidikan ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwasannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (KAI, 2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 49 juga mewajibkan bahwa pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran negara/daerah untuk pendidikan. Kebijakan pembangunan jangka menengah nasional juga menegaskan hal ini – RPJMN 2020–2024 menempatkan pengembangan kualitas SDM sebagai fokus utama, dengan penekanan peningkatan pemerataan mutu pendidikan sebagai strategi utama (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Dengan demikian, pendidikan diakui secara resmi sebagai komponen utama dalam peningkatan kualitas manusia dan IPM di tingkat nasional. Pemerintah menekankan bahwa sektor pendidikan bukan hanya tentang kuantitas siswa atau sarana, tetapi harus mampu mendorong terciptanya manusia yang produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen terhadap sektor pendidikan hal ini tercermin melalui alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2025, total APBD Kota

Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 12,3 triliun (Dinkominfo Surabaya, M.Fikser) dengan alokasi dana untuk fungsi pendidikan mencapai 2,588 triliun atau sekitar 20,96% dari total APBD. Anggaran ini tidak hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan namun juga tersebar di berbagai perangkat daerah lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan (BPKAD, Basri), sesuai dengan klasifikasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ketentuan alokasi dana pendidikan untuk wilayah daerah juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa alokasi minimal 20% untuk fungsi pendidikan bersifat wajib.

Tingginya alokasi dana anggaran pendidikan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir, rata-rata mencapai 21,6% dari APBD dan telah berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator pendidikan dan pembangunan manusia. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan rata-rata 21,6% dari anggaran daerah untuk sektor pendidikan. Alokasi ini berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Surabaya dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan. Peningkatan kedua indikator ini berkontribusi langsung terhadap naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya, dari 83,99 di tahun 2023 menjadi 84,69 di tahun 2024. Dengan angka ini, Surabaya menjadi kota dengan IPM tertinggi di Jawa Timur, bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Capaian positif indeks tersebut masih menyisakan tantangan serius, khususnya pada aspek keterjangkauan akses pendidikan dasar. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7–12 tahun di Surabaya hanya 97,88%, terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Artinya, masih terdapat sekitar 2,12% anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah. Kondisi ini menjadi ironi mengingat besarnya alokasi anggaran pendidikan Surabaya yang sudah memenuhi bahkan melampaui batas minimal nasional. Faktor penyebab rendahnya APS antara lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah tertentu, faktor ekonomi keluarga, lokasi tempat tinggal, disabilitas, serta dinamika sosial keluarga (BPD Jatim, 2023). Hal ini menegaskan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum otomatis menjamin keberhasilan akses dan kualitas pendidikan apabila tidak diikuti dengan distribusi program yang merata, efektivitas kebijakan, dan penguatan inklusivitas. Pemerintah Kota Surabaya perlu mengakselerasi program pendidikan berbasis outcome, memperluas program beasiswa berbasis data kesejahteraan sosial, revitalisasi sekolah dasar di kawasan padat penduduk, meningkatkan kapasitas dan distribusi guru berkualitas, serta mengembangkan sistem pemantauan Angka

Partisipasi Sekolah (APS) berbasis kelurahan. Dengan demikian, peran pendidikan sebagai pendorong utama peningkatan IPM dapat diperkuat tidak hanya melalui regulasi dan anggaran, tetapi juga melalui program-program yang tepat sasaran, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran Strategis APBD Kota Surabaya dalam Pembangunan Pendidikan

Kebijakan penganggaran pendidikan Kota Surabaya tahun 2023 dan 2024 dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang penyusunan APBD. Kedua aturan tersebut mewajibkan alokasi minimal 20% APBD untuk belanja pendidikan. Dalam praktiknya, Pemkot Surabaya menghitung belanja fungsi pendidikan yang tersebar lintas dinas, bukan hanya anggaran Dinas Pendidikan saja. Hal ini ditegaskan oleh Kominfo Surabaya bahwa alokasi 20% tersebut bersifat wajib dan sudah terintegrasi dalam SIPD Kemendagri.

Dalam realisasi anggaran pendidikan, berbagai program prioritas dibiayai penuh oleh APBD. Ketua DPRD Adi Sutarwijono menegaskan berbagai kebijakan itu: “Dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian bea siswa, pemberian seragam gratis untuk SD dan SMP negeri maupun swasta untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ditambah lagi dengan kenaikan honor guru TPQ, kenaikan honor bunda PAUD dan KSH (Kader Surabaya Hebat)”. Dengan kata lain, program seragam gratis bagi siswa miskin SD SMP dibiayai negara. Misalnya, Dinas Pendidikan memproyeksikan sekitar 20 ribu pelajar SD-SMP penerima seragam gratis pada tahun ajaran 2024/2025, sesuai instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menjamin hak pendidikan. Demikian pula, beasiswa pendidikan termasuk Beasiswa Pemuda Tangguh untuk pelajar SMA/SMK dan mahasiswa terus diperluas. Wali Kota Eri menyebut telah mengalokasikan puluhan ribu beasiswa yang terdapat 25.919 kuota pada tahun 2024 dan mendorongnya meningkat setiap tahun. Ia bahkan menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci mengentaskan kemiskinan: “Saya tidak ingin Surabaya masih ada pengangguran dan kemiskinan, dan salah satu caranya melalui pendidikan”.

Pembenahan sarana-prasarana pendidikan juga menjadi fokus, termasuk pembangunan dan renovasi sekolah melalui APBD lintas dinas. Misalnya, program pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung dianggarkan untuk mendukung zonasi sekolah dan kenyamanan belajar. Selain itu, Pemkot menggulirkan insentif guru dan pendidik nonformal. Di samping kenaikan honor untuk guru TPQ, bunda PAUD, dan KSH seperti disebutkan di atas, Pemkot rutin menaikkan tunjangan untuk guru PAUD, TPQ, dan kader pendidikan. Program KSH (Kader Surabaya Hebat) misalnya memberikan insentif bagi relawan pendidikan nonformal di

tingkat RW untuk memotivasi anak putus sekolah. Semua kebijakan ini diselaraskan dengan prinsip Sisdiknas bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran memadai bagi pendidikan.

Secara keseluruhan, strategi alokasi anggaran pendidikan Surabaya 2023–2024 menitikberatkan pada perluasan akses dan kualitas pendidikan sesuai undang-undang. Anggaran pendidikan diposisikan sebagai prioritas utama yang mana sekitar 20–21% dari APBD, dengan target program konkret, layanan sekolah gratis termasuk seragam dan perlengkapan, beasiswa bagi pelajar miskin, peningkatan sarana sekolah, dan pemberian insentif kepada tenaga pendidik baik formal maupun nonformal. Langkah ini konsisten dengan amanat UU No. 20/2003 dan Permendagri No. 15/2024, serta diperkuat pernyataan Wali Kota dan DPRD Surabaya sebagai komitmen untuk mencetak SDM unggul di Kota Pahlawan.

Tantangan implementasi (meliputi ketimpangan kualitas pendidikan pusat kota dan pinggiran)

Implementasi alokasi dana belanja Kota Surabaya tahun 2023-2024 menimbulkan berbagai tantangan yang signifikan dan berdampak pada efektivitas peningkatan sumber daya manusia. Meskipun secara nominal dana yang terserap sudah sesuai dari ketentuan minimal APBD yakni sebesar 20% sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun realisasi anggaran tersebut terhadap pemerataan kualitas pendidikan masih jauh dari kata ideal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa timur (2023) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan bahwa penyerapan anggaran pendidikan hanya mencapai 78,6% dari total pagu akibat kendala birokrasi dan perencanaan, hal ini terbukti dengan Data oleh Dinas Pendidikan Surabaya (2023) menunjukkan bahwa 45% program rehab sekolah terlambat 3-6 bulan akibat prosedur pengadaan yang berbelit akibat birokrasi yang kompleks dan kesenjangan antara perencanaan dengan pengadaan.

Terjadinya ketimpangan antara pendidikan di pusat Kota Surabaya dengan wilayah pinggiran menjadi isu krusial yang muncul, distribusi dana fisik yang tidak merata antar wilayah menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut. Data dari Dinas PUPR Surabaya (2023) menunjukkan bahwa sebesar 70% dana terserap di wilayah pusat kota sementara daerah pinggiran hanya mendapat sebesar 15%. Hal ini dikarenakan proyek pembangunan di pusat Kota dianggap lebih siap secara administratif serta lebih mudah dikelola karena infrastruktur pendukung yang tersedia cukup memadai, sedangkan di wilayah pinggiran seringkali terjadinya kompleksibilitas administratif, kondisi geografis, serta keterbatasan sumber daya manusia. seperti SDN Benowo II Surabaya yang sudah mengajukan proposal perbaikan

sekolah dari tahun 2021 namun tertunda sampai sekarang dikarenakan status lahan yang belum terverifikasi, terbatasnya kontraktor di wilayah pinggiran serta susah nya distribusi material ke daerah tersebut, sedangkan berbeda jauh dengan SDN Ketabang I Surabaya yang berada di pusat Kota proyek renovasi yang dijalankannya rampung tepat waktu, hal ini dikarenakan lahan milik pemda sudah tersedia, proses perizinan yang cepat, serta kondisi wilayah yang mudah dijangkau oleh kontraktor .

Ketimpangan kualitas tenaga pendidik juga menjadi salah satu faktor kesenjangan tersebut. Data Dinas Pendidikan Surabaya (2023) menunjukkan hanya 45% guru di wilayah pinggiran yang bersertifikasi, jauh di bawah angka 82% di pusat kota. Ketidakseimbangan ini akan berdampak pada mutu pembelajaran dan motivasi belajar siswa yang akhirnya akan berpengaruh pada capaian akademik siswa. Sarana dan prasarana juga menunjukkan kesenjangan yang signifikan, dilaporkan dari Kemendikbud Ristek (2023) mencatat bahwa rasio komputer di sekolah pinggiran mencapai 1;25 siswa, lima kali lebih sedikit dibandingkan pusat kota, yaitu 1:5. Ketimpangan ini menunjukan digitalisasi pembelajaran yang berjalan tidak merata. Dampak dari ketimpangan ini tercermin dari prestasi akademik, dimana nilai UN Matematika SMP di pinggiran 20% lebih rendah daripada pusat kota (BPS Jatim, 2023), menandakan adanya kesenjangan kualitas hasil belajar.

4. KESIMPULAN

Pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa alokasi belanja Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen yang baik oleh pemerintah kota baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap APBD sesuai amanat perundang-undangan, 20% APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan sesuai ketentuan nasional. Kebijakan terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap indikator pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, peneliti menemukan bahwa besarnya anggaran belum menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah.

Tantangan utama terletak pada ketimpangan pendidikan Pusat Kota dengan wilayah pinggiran, baik dari segi infrastruktur, distribusi guru bersertifikasi, serta sarana dan prasarana. Tantangan birokrasi yang kompleks dan distribusi anggaran yang kurang merata menyebabkan beberapa program pembangunan berjalan tidak optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pada tata kelola, aspek perencanaan, serta responsif terhadap kebutuhan wilayah. Dengan demikian, Implementasi anggaran pendidikan Kota Surabaya agar berjalan secara

merata di berbagai wilayah tidak hanya di Pusat Kota saja, maka dengan hal ini peran pendidikan diharapkan menjadi pendorong utama pembangunan manusia di Kota Surabaya.

Optimalisasi alokasi belanja pendidikan di Kota Surabaya memerlukan langkah-langkah strategis yang terfokus pada pemerataan mutu dan efektivitas kebijakan anggaran. Beberapa rekomendasi berikut disampaikan sebagai upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Pertama, distribusi anggaran pendidikan perlu diarahkan secara lebih proporsional, terutama bagi wilayah pinggiran yang masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur, tenaga pendidik, dan sarana penunjang pembelajaran. Ketimpangan alokasi ini berisiko memperbesar kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang menjadikan wilayah dengan kebutuhan tinggi sebagai prioritas, disertai dengan mekanisme pemantauan berbasis wilayah administratif seperti kelurahan untuk memastikan akurasi pelaksanaan.

Kedua, penyederhanaan mekanisme pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan perlu segera dilakukan. Kompleksitas birokrasi telah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program-program prioritas, termasuk rehabilitasi sekolah. Reformasi pada aspek tata kelola ini harus mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi tanpa mengabaikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Ketiga, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik perlu menjadi fokus dalam strategi pembangunan pendidikan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan bersertifikasi secara berkala, pemberian insentif berbasis kinerja, serta penguatan sistem redistribusi guru yang mempertimbangkan persebaran kebutuhan di seluruh wilayah kota.

Lalu yang terakhir, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi dan data aktual sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Pelibatan unsur masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam proses evaluasi akan memperkuat transparansi serta meningkatkan legitimasi kebijakan yang dijalankan.

REFERENSI

- Antara News. (2019, Oktober 14). *Pembangunan SDM jadi fokus RPJMN 2020–2024*. <https://www.antaraneews.com/berita/1095132/pembangunan-sdm-jadi-fokus-rpjm-2020-2024>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023, Desember 15). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya tahun 2023 mencapai 83,99*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/15/319/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-surabaya-tahun-2023-mencapai-83-99.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024, Desember 1). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya tahun 2024 mencapai 84,69*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/339/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-surabaya-tahun-2024-mencapai-84-69.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan manusia 2023*. <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/15/0e2d6f72bb0a9bc67f8b8431/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- Bappeda Surabaya. (2023). *Laporan realisasi APBD 2023*. https://bappeda.surabaya.go.id/uploads/publikasi/2023/Laporan_Realisasi_APBD_2023.pdf
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. https://ditkumlasi.bappenas.go.id/download/file/Narasi_RPJMN_2020-2024.pdf
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). *Reproduction in education, society and culture*. Sage. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/reproduction-in-education-society-and-culture/book203182>
- BPS Jawa Timur. (2023). *Statistik pendidikan Provinsi Jawa Timur 2023*.
- Dinas Pendidikan Surabaya. (2023). *Laporan kinerja pendidikan 2023*. https://dispendik.surabaya.go.id/uploads/publikasi/Laporan_Kinerja_2023.pdf
<https://jatim.bps.go.id/id/publication/2024/03/28/75d06d4fe44bdafc4d87da58/statistik-pendidikan-provinsi-jawa-timur-2023.html>
- Jatim Media. (2022, November 10). *DPRD Kota Surabaya tetapkan APBD 2023 kota Surabaya sebesar 11,2 triliun*. <https://www.jatimmedia.com/dprd-kota-surabaya-tetapkan-apbd-2023-kota-surabayasebesar-112-triliun/>
- Kemendikbudristek. (2023). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025*. <http://jdih.kemendagri.go.id/common/dokumen/Permendagri%20No%2015%20Tahun%202024.pdf>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.07/2024*. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/KMK_22_KMK.7_2024-tentang-Penandaan-Rincian-Belanja-Daerah-Dari-Hasil-Penerimaan-Pajak-Daerah-Yang-Telah-Ditentukan-Penggunaannya-Untuk-Evaluasi-Pemenuhan-Belanja-W.pdf
- Mauli.id. (2024, Oktober 29). *Problematisasi anggaran pendidikan Surabaya*. <https://mauli.id/2024/10/29/problematisasi-anggaran-pendidikan-surabaya-176/>
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674072350>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023, November 10). *Dok! APBD Surabaya 2024 disahkan sebesar Rp 10,9 triliun tepat di Hari Pahlawan*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/77258/dok-apbdsurabaya-2024-disahkan-sebesar-rp-109-triliun-tepat-di-hari-pahlawan>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024, Januari 21). *Wali Kota Eri Cahyadi gelontorkan 25 ribuan beasiswa*. <https://gapura.surabaya.go.id/wali-kota-eri-cahyadi-gelontorkan-25-ribuan-beasiswa>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025, Mei 16). *Anggaran pendidikan Surabaya 20,96 persen tak hanya di Dispendik, tapi juga lintas PD*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/23748/anggaran-pendidikan-surabaya-20-96-persen-tak-hanya-di-dispendik-tapi-juga-lintas-pd>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/development-as-freedom-9780198297581>
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>
- WahanaNews.co. (2024, Januari 14). *Program bantuan seragam gratis Dispendik Surabaya untuk 20 ribu pelajar miskin 2024/2025*. <https://wahananews.co/daerah/program-bantuan-seragam-gratisdispendik-surabaya-untuk-20-ribu-pelajar-miskin-20242025-gJJQL26WAs>